

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

UN Women merupakan entitas atau organisasi Internasional yang berada dibawah PBB dan bergerak dalam menerapkan kesetaraan gender dan juga mendorong pemberdayaan wanita di setiap negara anggota PBB. Kasus ketimpangan gender yang menjurus kearah diskriminasi sering kali dirasakan oleh perempuan-perempuan di seluruh dunia, seperti sulitnya mendapat kerja, upah yang tidak layak untuk para pekerja perempuan, sulitnya akses pada fasilitas publik seperti sekolah dan fasilitas kesehatan dan banyak hal lainnya. Melihat banyaknya ketimpangan dan diskriminasi yang terjadi pada wanita, PBB berinisiasi untuk membentuk UN Women dengan tujuan agar perempuan di seluruh dunia mendapatkan perlakuan yang adil dan mendapatkan haknya untuk hidup setara dengan laki-laki. UN Women merupakan gabungan dari beberapa unit di sistem PBB yang memiliki fokus terhadap kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, dimana unit-unit tersebut antara lain adalah Division for the Advancement of Women (DAW) dimana divisi ini bergerak untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan seperti mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara.¹ Unit kedua adalah International

¹ Committee on the Elimination of Discrimination Against Women, "About the Division for the Advancement of Women," United Nations, accessed September 05,

Research and Training Institute for the Advancement of Women (INSTRAW) dimana unit atau divisi ini bergerak untuk menyebarluaskan dan menerapkan pengetahuan atau informasi perihal pentingnya perspektif dari segala gender pada segala sektor, seperti pada bidang ekonomi dan sosial agar berkurangnya tingkat ketimpangan dan diskriminasi gender di sektor-sektor tertentu.² Unit ketiga adalah The office of the Special Adviser to the Secretary-General on Gender Issues and Advancement of Women (OSAGI) dimana unit ini memiliki tanggung jawab untuk mengawasi pengimplementasian Platform for Action dan Beijing+5 khususnya pada bidang Kemajuan Perempuan yang diterapkan secara substantif pada program-program PBB yang antara lain merupakan Majelis Umum PBB, Bidang Sosial Ekonomi, The Commission on the Status of Women, program layanan konsultasi untuk perempuan, penerapan perspektif gender dalam program dan kegiatan forum antar pemerintah atau negara maupun entitas PBB lainnya, memperjuangkan kesetaraan gender pada segala bidang termasuk dunia profesional, dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerjasama antar lembaga dengan mengandalkan perspektif gender pada setiap pelaksanaan program dan pembuatan kebijakan.³ Unit terakhir adalah United Nations Development Fund for Women (UNIFEM) dimana unit ini diberi tugas untuk terus mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan baik secara nasional maupun

2021, https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw25years/content/english/about_daw.htm
1.

² International Research and Training Institute for the Advancement of Women (INSTRAW), "Gender Mainstreaming," United Nations, accessed September 05, 2021, https://www.un.org/womenwatch/ianwge/gm_facts/Instraw.pdf.

³ United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women, "About the Office of the Special Adviser to the Secretary-General On Gender Issues and Advancement of Women," United Nations Women, accessed September 05, 2021, <https://www.un.org/womenwatch/osaginew/aboutosagi.htm>.

internasional dengan cara mendukung keamanan atas hak perempuan dalam bidang ekonomi, menghapuskan kekerasan terhadap perempuan dan mempromosikan pemerintahan yang peduli dan adil terhadap isu gender terlebih pada negara yang masih banyak terdapat isu diskriminasi kepada perempuan.⁴ Untuk dapat mewujudkan tujuan dari tiap unit yang telah tergabung menjadi suatu entitas baru yaitu UN Women ini tentunya dibutuhkan adanya kerja sama antara UN Women dengan pemerintah dari negara terkait untuk membuat hukum, kebijakan, dan program yang melindungi hak perempuan tersebut. Ada empat fokus utama yang sedang diperjuangkan oleh UN Women, yaitu partisipasi perempuan dalam sistem pemerintahan dengan porsi dan keuntungan yang sama dengan porsi laki-laki, tersedianya pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi perempuan yang didukung oleh kebijakan ekonomi negara yang bersangkutan, setiap perempuan memiliki hak untuk hidup bebas tanpa adanya perlakuan kekerasan dalam bentuk apapun, dan yang terakhir adalah mendorong kontribusi dan pengaruh perempuan dalam membangun perdamaian dan pertahanan serta mendapatkan keuntungan yang setara atas segala tindakan pencegahan bencana alam atau konflik tindakan kemanusiaan.⁵ Fokus tersebut menarik minat penulis untuk melakukan penelitian dalam sejauh mana peran UN Women dalam mendorong partisipasi perempuan khususnya dalam bidang ekonomi yang saat

⁴United Nations Development Fund for Women (UNIFEM), "Policy and Programme Work On International Migration by the United Nations Development Fund for Women," United Nations, accessed September 05, 2021, https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/unpd-cm7-2008-11_p06_unifem.pdf.

⁵ UN Women, "About UN Women", Accessed September 05, 2021, <https://www.unwomen.org/en/about-us/about-un-women>

ini kita tahu masih didominasi oleh laki-laki. Dominasi tersebut dapat berakibat kepada ketimpangan gender bahkan diskriminasi pada hak-hak perempuan di dunia pekerjaan. Ketimpangan gender dalam dunia pekerjaan tentunya merupakan suatu masalah yang sudah berakar, maka dari itu disinilah peran UN Women dibutuhkan untuk mewujudkan kesetaraan gender dan melindungi hak-hak pekerja perempuan tentunya dengan bantuan organisasi kemasyarakatan lain, Kementerian dan Lembaga setempat.

Kesetaraan gender merupakan suatu keadaan dimana setiap individu memiliki kesempatan untuk mencapai apapun yang mereka tuju tanpa adanya tindakan diskriminasi berbasis gender dari individu lainnya. Setiap gender memiliki hak dan kebutuhan yang sama di mata hukum dan masyarakat. Selama ini laki-laki kerap kali mendapat *privilege* lebih dibanding perempuan, baik dalam politik, perusahaan dan kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut menghasilkan masyarakat yang memiliki pemikiran bahwa perempuan lebih inferior dibanding laki-laki yang mengakibatkan sulitnya perempuan dalam mendapatkan pekerjaan layak atau bahkan mendapatkan diskriminasi dalam dunia pekerjaan. Sedangkan dalam kehidupan bermasyarakat contoh diskriminasi yang paling sering kita temui adalah para perempuan korban pelecehan seksual yang dianggap salah dan wajar dapat perlakuan tersebut entah karena baju yang mereka pakai, cara berjalan mereka hingga bentuk tubuh mereka.

Hal-hal memprihatinkan tersebut dapat dihasilkan dari beberapa faktor seperti kurangnya perlindungan hukum yang kemudian diperparah oleh

pemikiran masyarakat tersebut. Indikator telah tercapainya kesetaraan gender adalah mulai tumbuhnya kepedulian dan pemikiran masyarakat akan pentingnya hak perempuan sehingga mereka tidak perlu menganggap perempuan sebagai makhluk inferior, jika pemikiran tersebut sudah dapat diterima masyarakat dengan baik maka peluang perempuan dalam mendapatkan haknya akan semakin besar, seperti mulai diterimanya kepemimpinan wanita baik dalam struktur politik maupun perusahaan.⁶ Dukungan pemerintah untuk membentuk kebijakan yang masih belum bekerja secara optimal dalam mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Selain itu peran dari para penggiat organisasi nonnegara khususnya dalam bidang hak asasi manusia juga belum terealisasi secara merata, karena masih banyak kita lihat aksi diskriminasi yang terjadi walaupun para aktor nonnegara ini memiliki tujuan untuk menyebarkan kepedulian masyarakat akan pentingnya penghapusan diskriminasi perempuan.

Dengan berbagai macam budaya dan adat yang kental di Indonesia, salah satunya budaya yang menganggap laki-laki berada diatas perempuan merupakan salah satu faktor pendukung diskriminasi atau ketimpangan gender dalam berbagai bidang. Sejak zaman dahulu, perempuan hanya dianggap sebagai pendamping laki-laki dimana perannya hanya berada seputar pekerjaan rumah seperti mengurus anak dan rumah, bahkan pendidikan tinggi bagi perempuan adalah sesuatu yang tidak penting karena masyarakat berpikiran bahwa setinggi

⁶ Emmaline Soken-Huberty, "What Does Gender Equality Mean?", *Human Rights Careers*, <https://www.humanrightscareers.com/issues/what-does-gender-equality-mean/>

apapun pendidikan perempuan akan kembali lagi ke kodratnya yaitu menjadi pendamping laki-laki dimana derajatnya akan berada dibawah laki-laki. Namun perlawanan atas budaya tersebut sudah ada sejak munculnya emansipasi wanita yang diperkenalkan oleh RA. Kartini kepada perempuan-perempuan Indonesia. Pada tahun 1928 tepatnya pada tanggal 22 Desember telah dilaksanakan Kongres Perempuan Indonesia yang pertama dimana telah dihadiri oleh 30 organisasi perempuan dari total 12 kota dari penjuru Jawa dan Sumatra dimana hal tersebut menjadi awal perjuangan perempuan di Indonesia. Salah satu hasil dari Kongres ini adalah ditetapkannya Hari Ibu pada tanggal 22 Desember yang kemudian diresmikan oleh Presiden Soekarno melalui Keputusan Presiden RI No. 316 tanggal 16 Desember 1959 menjadi Hari Nasional.⁷

Pada tanggal 16 Desember 2020, *United Nations Development Programme* (UNDP) Indonesia mengeluarkan Laporan Pembangunan Manusia Tahunan untuk Indonesia dimana nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia adalah 0,718 dengan kategori pembangunan manusia yang tinggi. Angka tersebut telah naik sebanyak 37,3% semenjak tahun 1990 dan berpengaruh kepada angka harapan hidup dan lama harapan bersekolah sehingga setara dengan nilai rata-rata negara-negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik.⁸ Tetapi hingga saat ini masih sangat banyak kita temui diskriminasi terhadap perempuan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Indonesia per tahun 2019, persentase

⁷ Kowani, "Sejarah Singkat Kowani," Kongres Wanita Indonesia, accessed September 06, 2021, <https://kowani.or.id/sejarah/>.

⁸ Tomi Soetjipto and Ranjit Rose, "Dalam Laporan Undp Terbaru, Indonesia Tetap Berada Dalam Kategori Pembangunan Manusia Yang Tinggi," UNDP Indonesia, accessed September 06, 2021, <https://www.id.undp.org/content/indonesia/id/home1/presscenter/pressreleases/2020/Dalam-laporan-UNDP-terbaru.html>.

melek huruf penduduk dengan rentang usia 15-59 tahun menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa Laki-laki melek huruf berjumlah 98,77% sedangkan perempuan berada dibawahnya yaitu sebesar 97,79%. Kemudian persentase tenaga kerja formal antara perempuan dan laki-laki memiliki *gap* yang cukup signifikan dimana Persentase Tenaga Kerja Formal Laki-laki sebesar 47,19% persen sedangkan Persentase Tenaga Kerja Formal Perempuan hanya sebesar 39,19%.⁹ Hal tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya perempuan di Indonesia mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan karena ada kepentingan lain yang dikejar oleh perempuan, seperti contohnya banyak perempuan putus sekolah karena adanya budaya patriarki di lingkungan atau keluarganya yang membuat dia tidak dapat mengakses pendidikan karena menurut keluarganya, seorang perempuan tidak perlu memiliki pendidikan tinggi, mereka hanya perlu mengurus rumah tangga dan anak sehingga pendidikan bukanlah prioritas. Bukti tersebut dapat dilihat dari perbandingan persentase jumlah masyarakat melek huruf antara perempuan dan laki-laki di Indonesia dimana jumlah persentase perempuan berada dibawah laki-laki padahal peran wanita pada perekonomian Indonesia juga berpengaruh karena sebanyak 47,46% perempuan tercatat sebagai tenaga kerja profesional di tahun 2019,¹⁰ sehingga hampir 50% dari populasi perempuan turut membantu dalam peningkatan ekonomi yang dicapai oleh

⁹ Survei Angkatan Kerja Nasional, “Persentase Tenaga Kerja Formal Menurut Jenis Kelamin (Persen), 2018-2020,” Badan Pusat Statistik, accessed September 07, 2021, <https://www.bps.go.id/indicator/6/1170/1/persentase-tenaga-kerja-formal-menurut-jenis-kelamin.html>.

¹⁰ Sensus, “Perempuan Sebagai Tenaga Profesional (Persen), 2019-2020,” Badan Pusat Statistik, accessed September 07, 2021, <https://www.bps.go.id/indicator/40/466/1/perempuan-sebagai-tenaga-profesional.html>.

Indonesia. Tidak hanya itu, pada tahun 2019 tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan hanya sebesar 55,51% sedangkan laki-laki sebesar 82,59% yang berarti perempuan tidak memiliki kesempatan bekerja yang setara dengan laki-laki.

Melihat pentingnya peran perempuan dalam pembangunan ekonomi Indonesia ini dan fakta-fakta yang telah dijelaskan pada paragraf-paragraf sebelumnya, penulis berharap penelitian ini dapat menjadi sebuah sumber pengetahuan lebih bagi pembaca sekalian dalam melihat seberapa besar peran UN Women dalam mendorong dan memberdayakan perempuan-perempuan Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Menilai adanya pengaruh dari UN Women dalam komitmennya untuk mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia dan mendukung segala bentuk pemberdayaan perempuan khususnya dalam bidang ekonomi menghasilkan rumusan masalah dari penelitian ini. Rumusan masalah ini dibuat dengan tujuan dimana adanya keinginan untuk mengetahui apa perbedaan yang dirasakan oleh perempuan di Indonesia atas berdirinya UN Women yang turut mendorong parak aktor negara dan nonnegara dalam upaya pemberdayaan ekonomi perempuan di Indonesia. Berdasarkan penjelasan yang telah penulis jabarkan pada bagian latar belakang, penulis telah membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kontribusi UN Women dalam mendorong aktor negara dan nonnegara dalam upaya pemberdayaan ekonomi perempuan di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini dibentuk oleh penulis untuk melihat hal-hal sebagai berikut:

1. Bagaimana UN Women berkontribusi dalam mendorong aktor negara dan nonnegara dalam memberdayakan ekonomi perempuan di Indonesia.
2. Melihat perspektif Neoliberalisme dalam melihat kontribusi dari UN Women dalam mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan di Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

Manfaat dari dibuatnya penelitian ini penulis tujukan kepada pembaca agar dapat menambah pemahaman akan betapa pentingnya untuk menghapus segala bentuk diskriminasi dan ketimpangan sosial berbasis gender dengan harapan esensi dari penelitian ini dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tindakan diskriminasi terhadap perempuan dapat berkurang atau bahkan hilang. Manfaat lain dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca seputar bagaimana peran perempuan dapat memengaruhi peningkatan ekonomi di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini akan terbagi menjadi lima bagian yang terdiri dari:

BAB I : Pada bab ini penulis memaparkan latar belakang dari topik yang dipilih dilanjut dengan rumusan masalah sebagai titik awal atau dasar penelitian yang terdiri dari dua pertanyaan kemudian dijelaskan juga oleh penulis apa tujuan dan manfaat dari adanya penelitian ini.

BAB II : Bab ini berisi tentang kerangka berpikir yang digunakan penulis dalam penelitian ini. Dalam bab ini akan berisi tinjauan pustaka yang merupakan pemaparan dari kajian literatur dan jurnal penelitian yang relevan dengan penelitian ini dan juga teori atau konsep apa saja yang digunakan penulis sebagai dasar analisis penulis yang nantinya akan menjawab rumusan masalah yang telah disusun penulis.

BAB III : Dalam bab ini penulis akan memaparkan metode apa saja yang penulis gunakan dalam melengkapi penelitian ini. Hal-hal yang tercakup dalam bab ini antara lain adalah pendekatan dan pendekatan yang digunakan, teknik pengumpulan seperti apa yang penulis gunakan dan teknik analisis data apa yang penulis terapkan dalam melakukan penelitian ini.

BAB IV : Bab ini merupakan bab inti dari penelitian ini karena hasil dari penelitian akan dianalisis menggunakan teori dan konsep yang telah ditentukan oleh penulis sehingga dapat terlihat sejauh mana peran UN Women dalam mendorong kontribusi perempuan untuk membangun perekonomian Indonesia.

BAB V : Pada bab ini penulis akan memaparkan keseluruhan hasil penelitian dan analisis menggunakan teori dan konsep yang penulis tentukan, serta pendapat atau saran yang diberikan oleh penulis terhadap peran UN Women dalam mendorong kontribusi perempuan untuk membangun perekonomian Indonesia.